

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan terkait hak-hak dan kewajiban negara tercantum di Konvensi Montevideo 1993, yang menyatakan bahwa negara dapat menegakkan hukum dengan mematuhi hukum yang konsisten dengan hukum. Konvensi ini menguraikan hak dan kewajiban negara, termasuk hak untuk membela diri, hak untuk campur tangan pada urusan negara lain, hak untuk melindungi HAM, hak untuk mempertahankan diri dari ancaman, hak untuk menjaga perdamaian, hak untuk menghindari kekerasan, hak untuk menghindari penggunaan kekerasan, hak untuk menghindari pemberlakuan hukum yang mengancam kedaulatan negara lain, dan hak untuk membela diri.
2. Pada April 2014 sampai September 2022, Republik Rakyat Donetsk beserta Republik Rakyat Luhansk menyatakan diri sebagai negara merdeka dari Ukraina yang kemudian di akui kemerdekaannya oleh Rusia dan pengakuan tersebut dianggap bersifat prematur. Pengakuan tersebut dilakukan tanpa dipenuhinya syarat-syarat berdirinya suatu negara oleh wilayah tersebut. Hak -hak yang dimiliki oleh negara dengan pengakuan prematur seperti hak untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara pengaku, partisipasi dalam organisasi internasional tertentu, dan klaim kedaulatan atas wilayah serta penduduknya. Pengakuan ini juga membuka peluang bagi negara tersebut untuk mendapatkan bantuan internasional,

baik secara ekonomi, politik, maupun keamanan. Namun, negara yang diakui prematur tetap memiliki kewajiban, seperti mematuhi hukum internasional, menghormati perjanjian yang disepakati, memastikan perlindungan pada HAM, serta menyelesaikan konflik secara damai sesuai prinsip hukum internasional. Pada 30 September 2022, Rusia secara resmi menganeksasi Wilayah Donetsk dan Luhansk, juga dua lainnya. Yang mengakibatkan Republik Rakyat Luhansk dan Republik Rakyat Donetsk membatalkan klaim mereka selaku negara merdeka dan menganggap mereka bagian dari Rusia dan bergabung dengan Federasi Rusia dan membatalkan hak-hak dan kewajiban Republik Rakyat Donetsk beserta Republik Rakyat Luhansk selaku negara.

B. Saran

1. Pengaturan mengenai hak-hak dan kewajiban dalam Konvensi Montevideo seharusnya lebih menekankan perlunya pemerintahan yang benar-benar mampu menjalankan fungsi negara secara efisien dan menghormati hukum internasional. Perihal ini termasuk perlindungan terhadap HAM dan pemerintahan yang transparan. Konvensi Montevideo dapat dilengkapi dengan panduan yang lebih rinci terkait proses pengakuan internasional untuk dapat melindungi integritas wilayah dan kedaulatan negara asal untuk mencegah konflik dan aneksasi ilegal. Agar negara yang diakui dapat menjalankan hubungan internasional yang sehat, Konvensi Montevideo bisa menambahkan ketentuan tentang persyaratan minimum untuk menjalin hubungan diplomatik, seperti pengakuan standar terhadap batas wilayah dan komitmen non-intervensi.

2. Dalam pemberian pengakuan terhadap negara baru, tidak seharusnya dilakukan atas dasar kepentingan pribadi negara tersebut. Menegaskan kembali pentingnya prinsip kedaulatan dan integritas teritorial negara-negara dalam hukum internasional. Bahwa negara tidak serta-merta bisa ikut campur dalam urusan internal yang terjadi di negara lain. Bahwa tindakan aneksasi yang Rusia lakukan ke beberapa wilayah di Ukraina melanggar prinsip hukum internasional dan seharusnya ditindak tegas.